



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.6/M.PPN/HK/01/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2022**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun RKP Tahun 2022, dengan

susunan ...

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun RKP 2022 terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Sinkronisasi, Tim Penulis Narasi, Tim Koordinasi Proses Perencanaan, Tim Koordinasi Penyusun Substansi dan Tim Dukungan Administrasi.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, melaksanakan arahan dari Pengarah, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan RKP Tahun 2022;
 - b. memastikan penyusunan Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta memantau kesinambungan data dan alokasi proyek prioritas pada RKP, Pagu Indikatif/Anggaran, KRISNA, dan RKA-KL;
 - c. melakukan supervisi implementasi kesinambungan/sinkronisasi indikator RPJMN 2020-2024 dengan RKP Tahun 2022, Pagu Indikatif/Anggaran, KRISNA serta RKA KL; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tim Sinkronisasi bertugas menjaga konsistensi substansi dan keselarasan antar Bab dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan menyusun rancangan pidato Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkait Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.
- KETUJUH : Tim Penulis Narasi bertugas:
- a. melaksanakan penulisan substansi Bab (narasi dan matriks) dalam Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022; dan
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka penulisan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

KEDELAPAN : ...

- KEDELAPAN : Tim Koordinasi Proses Perencanaan terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab Rapat Koordinasi dengan Gubernur yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi dengan Gubernur;
 - b. Penanggung Jawab Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi teknis;
 - c. Penanggung Jawab Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi pembangunan pusat;
 - d. Penanggung Jawab Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi Musrenbang Provinsi; dan
 - e. Penanggung Jawab Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi Musrenbang Nasional.
- KESEMBILAN : Tim Koordinasi Penyusun Substansi bertugas:
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan, format, dan mekanisme penulisan substansi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
 - b. melaksanakan teknis finalisasi penulisan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (termasuk penajaman kualitas narasi dan penelaahan ketepatan hierarki); dan
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pembahasan dan tugas lainnya.
- KESEPULUH : Tim Dukungan Administrasi bertugas mengompilasi dan memformat bahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, serta mengoordinasikan penyelenggaraan rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat.
- KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun RKP Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021.

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.6/M.PPN/HK/01/2021
TANGGAL 28 JANUARI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2022**

- A. PENGARAH** : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB** : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Inspektur Utama.
- C. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
2. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
3. Deputi Bidang Ekonomi;
4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
6. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
7. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
- D. TIM SINKRONISASI**
- Ketua : Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan.

- Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;
4. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan;
5. Prof. Ir. Kemal Taruc, M.Sc, MBA;
6. Dr. Ir. Chairil Abdini, Ph.D;
7. Kartika Yudhisti, B.Eng;
8. Ervan Maksun, ST, M.Sc;
9. Ir. Kennedy Simanjuntak, MA.

E. TIM PENULIS NARASI

BAB 1: PENDAHULUAN

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

BAB 2: SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

2.1. Evaluasi RKP 2020

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektor.

2.2. Kerangka Ekonomi Makro

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Ekonomi.

Ketua Pelaksana : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.

2.3. Strategi Pengembangan Wilayah

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.

Ketua Pelaksana : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.

2.4. Strategi Pendanaan Pembangunan

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

BAB 3: TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

3.1. RPJMN 2020-2024 dan Arah Presiden

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

3.2. Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

3.3. Prioritas Nasional

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

BAB 4: PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA

4.1. Prioritas Nasional

4.1.1. Prioritas Nasional: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Ekonomi.

Ketua Pelaksana : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

a. Program Prioritas: Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.

1) Kegiatan Prioritas: Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan

Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.

2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Nabati

Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.

3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik

Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.

4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Industri Pendukung EBT

Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.

5) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi

Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.

b. Program Prioritas: Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Penanggung Jawab : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.

1) Kegiatan Prioritas: Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung

Penanggung Jawab : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.

2) Kegiatan Prioritas: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Penanggung Jawab : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.

3) Kegiatan Prioritas: Penyediaan Air untuk Pertanian

Penanggung Jawab : Direktur Pengairan dan Irigasi.

- 4) Kegiatan Prioritas: Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas
Penanggung Jawab : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
- 5) Kegiatan Prioritas: Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau
Penanggung Jawab : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
- 6) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Waduk Multiguna
Penanggung Jawab : Direktur Pengairan dan Irigasi.

c. Program Prioritas: Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan

- Penanggung Jawab : Direktur Pangan dan Pertanian.
- 1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan
Penanggung Jawab : Direktur Pangan dan Pertanian.
 - 2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian, Perikanan dan Pangan Hasil Laut Secara Berkelanjutan
Penanggung Jawab : Direktur Pangan dan Pertanian.
 - 3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar
Penanggung Jawab : Direktur Pangan dan Pertanian.
 - 4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian
Penanggung Jawab : Direktur Pangan dan Pertanian.
 - 5) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional
Penanggung Jawab : Direktur Pangan dan Pertanian.

d. Program Prioritas: Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan

- Penanggung Jawab : Direktur Kelautan dan Perikanan.
- 1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut Dan Rencana Zonasi Pesisir Serta Pengelolaan Ruang Laut
Penanggung Jawab : Direktur Kelautan dan Perikanan.

2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan

Penanggung Jawab : Direktur Kelautan dan Perikanan.

3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan

Penanggung Jawab : Direktur Kelautan dan Perikanan.

4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Fasilitasi Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil Serta Akses Terhadap Pengelolaan Sumber Daya

Penanggung Jawab : Direktur Kelautan dan Perikanan.

5) Kegiatan Prioritas: Peningkatan SDM dan Riset Kemaritiman dan Kelautan serta *Database* Kelautan Dan Perikanan

Penanggung Jawab : Direktur Kelautan dan Perikanan.

e. Program Prioritas: Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi

Penanggung Jawab : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar

Penanggung Jawab : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha

Penanggung Jawab : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi

Penanggung Jawab : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Penciptaan *Start-Up* dan Peluang Usaha

Penanggung Jawab : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

5) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial

Penanggung Jawab : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

f. Program Prioritas: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi

Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan *Non* Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir

Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, termasuk melalui Pengembangan *Smelter* dan Kawasan Industri terutama di luar Jawa

Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok

Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital

Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

5) Kegiatan Prioritas: Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan

Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.

6) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Industri Halal

Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

g. Program Prioritas: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.

1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa

Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.

- 2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor
Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
- 3) Kegiatan Prioritas: Pengelolaan Impor
Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
- 4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif
Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
- 5) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Partisipasi Dalam Jaringan Produksi Global
Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
- 6) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi *Branding*, dan Produk Kreatif
Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
- 7) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan Diplomasi Ekonomi
Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.

h. Program Prioritas: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

- Penanggung Jawab : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter.
- 1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan
Penanggung Jawab : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN.
 - 2) Kegiatan Prioritas: Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0
Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - 3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga
Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.

4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata

Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

5) Kegiatan Prioritas: Reformasi Fiskal

Penanggung Jawab : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter

6) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital

Penanggung Jawab : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.

4.1.2. Prioritas Nasional: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.

Ketua Pelaksana : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana

a. Program Prioritas: Pembangunan Wilayah Sumatera

Penanggung Jawab : Direktur Regional I.

1) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Strategis

Penanggung Jawab : Direktur Regional III.

2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Sektor Unggulan

Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.

3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Perkotaan

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

Penanggung Jawab : 1. Direktur Regional III (Pengembangan Daerah Tertinggal);
2. Direktur Regional II (Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Transmigrasi);
3. Direktur Pembangunan Daerah (Pengembangan Kawasan Perdesaan).

- 5) Kegiatan Prioritas: Kelembagaan dan Keuangan Daerah
Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

b. Program Prioritas: Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Penanggung Jawab : Direktur Regional I.

- 1) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Strategis
Penanggung Jawab : Direktur Regional III.
- 2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Sektor Unggulan
Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.
- 3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Perkotaan
Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.
- 4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
Penanggung Jawab : 1. Direktur Regional III (Pengembangan Daerah Tertinggal);
2. Direktur Regional II (Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Transmigrasi);
3. Direktur Pembangunan Daerah (Pengembangan Kawasan Perdesaan).
- 5) Kegiatan Prioritas: Kelembagaan dan Keuangan Daerah
Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

c. Program Prioritas: Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

Penanggung Jawab : 1. Direktur Regional II;
2. Direktur Regional III.

- 1) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Strategis
Penanggung Jawab : Direktur Regional III.
- 2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Sektor Unggulan
Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.
- 3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Perkotaan
Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

- 4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

Penanggung Jawab : 1. Direktur Regional III (Pengembangan Daerah Tertinggal);
2. Direktur Regional II (Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Transmigrasi);
3. Direktur Pembangunan Daerah (Pengembangan Kawasan Perdesaan).

- 5) Kegiatan Prioritas: Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

d. Program Prioritas: Pembangunan Wilayah Kalimantan

Penanggung Jawab : Direktur Regional II.

- 1) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Strategis

Penanggung Jawab : Direktur Regional III.

- 2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Sektor Unggulan

Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.

- 3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Perkotaan

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

- 4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

Penanggung Jawab : 1. Direktur Regional III (Pengembangan Daerah Tertinggal);
2. Direktur Regional II (Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Transmigrasi);
3. Direktur Pembangunan Daerah (Pengembangan Kawasan Perdesaan).

- 5) Kegiatan Prioritas: Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

e. Program Prioritas: Pembangunan Wilayah Sulawesi

Penanggung Jawab : Direktur Regional II

- 1) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Strategis

Penanggung Jawab : Direktur Regional III.

- 2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Sektor Unggulan

Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.

3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Perkotaan

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah

4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

Penanggung Jawab : Direktur Regional II.

5) Kegiatan Prioritas: Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

f. Program Prioritas: Pembangunan Wilayah Maluku

Penanggung Jawab : Direktur Regional III.

1) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Strategis

Penanggung Jawab : Direktur Regional III.

2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Sektor Unggulan

Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.

3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Perkotaan

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah

4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

Penanggung Jawab : 1. Direktur Regional III (Pengembangan Daerah Tertinggal);

2. Direktur Regional II (Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Transmigrasi);

3. Direktur Pembangunan Daerah (Pengembangan Kawasan Perdesaan).

5) Kegiatan Prioritas: Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

g. Program Prioritas: Pembangunan Wilayah Papua

Penanggung Jawab : Direktur Regional III.

1) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Strategis

Penanggung Jawab : Direktur Regional III.

- 2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Sektor Unggulan
Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.
- 3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Perkotaan
Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah
- 4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
Penanggung Jawab :
 1. Direktur Regional III (Pengembangan Daerah Tertinggal);
 2. Direktur Regional II (Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Transmigrasi);
 3. Direktur Pembangunan Daerah (Pengembangan Kawasan Perdesaan).
- 5) Kegiatan Prioritas: Kelembagaan dan Keuangan Daerah
Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

4.1.3 Prioritas Nasional: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan.
- Wakil Penanggung Jawab : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- Ketua Pelaksana : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

a. Program Prioritas: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan

- Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.
- 1) Kegiatan Prioritas: Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan
Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.
 - 2) Kegiatan Prioritas: Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan
Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.
 - 3) Kegiatan Prioritas: Pendampingan dan Layanan Terpadu
Penanggung Jawab : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - 4) Kegiatan Prioritas: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.

b. Program Prioritas: Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial

Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.

1) Kegiatan Prioritas: Sistem Jaminan Sosial Nasional

Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.

2) Kegiatan Prioritas: Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran

Penanggung Jawab : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

3) Kegiatan Prioritas: Perlindungan Sosial Adaptif

Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.

4) Kegiatan Prioritas: Kesejahteraan Sosial

Penanggung Jawab : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.

c. Program Prioritas: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Penanggung Jawab : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi

Penanggung Jawab : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat

2) Kegiatan Prioritas: Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat

Penanggung Jawab : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat

3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Pengendalian Penyakit

Penanggung Jawab : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat

4) Kegiatan Prioritas: Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

Penanggung Jawab : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat

5) Kegiatan Prioritas: Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan

Penanggung Jawab : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat

d. Program Prioritas: Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
 - 2) Kegiatan Prioritas: Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun
Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
 - 3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
 - 4) Kegiatan Prioritas: Pejaminan Mutu Pendidikan
Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
 - 5) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Tata Kelola Pendidikan
Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
- e. Program Prioritas: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda**
- Penanggung Jawab : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga.
- 1) Kegiatan Prioritas: Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Penanggung Jawab : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga
 - 2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
Penanggung Jawab : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga
 - 3) Kegiatan Prioritas: Kualitas Pemuda
Penanggung Jawab : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga
- f. Program Prioritas: Pengentasan Kemiskinan**
- Penanggung Jawab : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 1) Kegiatan Prioritas: Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga
Penanggung Jawab : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- 2) Kegiatan Prioritas: Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial
Penanggung Jawab : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 3) Kegiatan Prioritas: Reforma Agraria
Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.
- 4) Kegiatan Prioritas: Perhutanan Sosial
Penanggung Jawab : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.

g. Program Prioritas: Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

- Penanggung Jawab : Direktur Ketenagakerjaan.
- 1) Kegiatan Prioritas: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri
Penanggung Jawab : Direktur Ketenagakerjaan.
 - 2) Kegiatan Prioritas: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas
Penanggung Jawab : Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - 3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kapabilitas IPTEK dan Penciptaan Inovasi
Penanggung Jawab : Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - 4) Kegiatan Prioritas: Prestasi Olahraga
Penanggung Jawab : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga.

4.1.4. Prioritas Nasional: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.
- Ketua Pelaksana : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

a. Program Prioritas: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter

- Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 1) Kegiatan Prioritas: Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti
Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
 - 2) Kegiatan Prioritas: Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintah untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif
Penanggung Jawab : Direktur Aparatur Negara.
 - 3) Kegiatan Prioritas: Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter
Penanggung Jawab : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga.
 - 4) Kegiatan Prioritas: Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental
Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.
 - 5) Kegiatan Prioritas: Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila
Penanggung Jawab : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
 - 6) Kegiatan Prioritas: Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme
Penanggung Jawab : Direktur Politik dan Komunikasi.
- b. Program Prioritas: Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia**
- Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
- 1) Kegiatan Prioritas: Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal
Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
 - 2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 3) Kegiatan Prioritas: Perlindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Diplomasi Budaya untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia dalam Perkembangan Peradaban Dunia

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 5) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

c. Program Prioritas: Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 1) Kegiatan Prioritas: Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan dikalangan Umat Beragama

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 2) Kegiatan Prioritas: Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 3) Kegiatan Prioritas: Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 5) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

d. Program Prioritas: Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Budaya Literasi

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

2) Kegiatan Prioritas: Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Budaya IPTEK, Inovasi, Kreativitas, dan Daya Cipta

Penanggung Jawab : Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

4) Kegiatan Prioritas: Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

4.1.5. Prioritas Nasional: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Ketua Pelaksana : Direktur Transportasi.

a. Program Prioritas: Infrastruktur Pelayanan Dasar

Penanggung Jawab : Direktur Perumahan dan Pemukiman.

1) Kegiatan Prioritas: Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau

Penanggung Jawab : Direktur Perumahan dan Pemukiman.

2) Kegiatan Prioritas: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman

Penanggung Jawab : Direktur Perumahan dan Pemukiman.

- 3) Kegiatan Prioritas: Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan
Penanggung Jawab : Direktur Pengairan dan Irigasi.
- 4) Kegiatan Prioritas: Keselamatan dan Keamanan Transportasi
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.
- 5) Kegiatan Prioritas: Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
Penanggung Jawab : Direktur Pengairan dan Irigasi.
- 6) Kegiatan Prioritas: Waduk *Multipurpose* dan Modernisasi Irigasi
Penanggung Jawab : Direktur Pengairan dan Irigasi.

b. Program Prioritas: Infrastruktur Ekonomi

Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.

- 1) Kegiatan Prioritas: Konektivitas Jalan
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.
- 2) Kegiatan Prioritas: Konektivitas Kereta Api
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.
- 3) Kegiatan Prioritas: Konektivitas Laut
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.
- 4) Kegiatan Prioritas: Konektivitas Udara
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.
- 5) Kegiatan Prioritas: Konektivitas Darat
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.

c. Program Prioritas: Infrastruktur Perkotaan

Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.

- 1) Kegiatan Prioritas: Transportasi Perkotaan
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.
- 2) Kegiatan Prioritas: Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan
Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.
- 3) Kegiatan Prioritas: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan
Penanggung Jawab : Direktur Perumahan dan Pemukiman.

- 4) Kegiatan Prioritas: Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan

Penanggung Jawab : Direktur Perumahan dan Pemukiman.

d. Program Prioritas: Energi dan Ketenagalistrikan

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika.

- 1) Kegiatan Prioritas: Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

- 2) Kegiatan Prioritas: Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

- 3) Kegiatan Prioritas: Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

e. Program Prioritas: Transformasi Digital

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

- 1) Kegiatan Prioritas: Penuntasan Infrastruktur TIK

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

- 2) Kegiatan Prioritas: Pemanfaatan Infrastruktur TIK

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

- 3) Kegiatan Prioritas: Fasilitas Pendukung Transformasi Digital

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

4.1.6. Prioritas Nasional: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.

Ketua Pelaksana : Direktur Lingkungan Hidup.

a. Program Prioritas: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup.

- 1) Kegiatan Prioritas: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup.

- 2) Kegiatan Prioritas: Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup.

- 3) Kegiatan Prioritas: Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup.

- 4) Kegiatan Prioritas: Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup.

b. Program Prioritas: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.

- 1) Kegiatan Prioritas: Penanggulangan Bencana

Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.

- 2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Ketahanan Iklim

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup

c. Program Prioritas: Pembangunan Rendah Karbon

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup

- 1) Kegiatan Prioritas: Pembangunan Energi Berkelanjutan

Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan.

- 2) Kegiatan Prioritas: Pemulihan Lahan Berkelanjutan

Penanggung Jawab : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.

- 3) Kegiatan Prioritas: Pengelolaan Limbah

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup.

- 4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Industri Hijau
Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
- 5) Kegiatan Prioritas: Rendah Karbon Pesisir dan Laut
Penanggung Jawab : Direktur Kelautan dan Perikanan.

4.1.7. Prioritas Nasional: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.
- Ketua Pelaksana : Direktur Hukum dan Regulasi.

a. Program Prioritas: Konsolidasi Demokrasi

- Penanggung Jawab : Direktur Politik dan Komunikasi.
- 1) Kegiatan Prioritas: Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi
Penanggung Jawab : Direktur Politik dan Komunikasi.
 - 2) Kegiatan Prioritas: Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan
Penanggung Jawab : Direktur Politik dan Komunikasi.
 - 3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik
Penanggung Jawab : Direktur Politik dan Komunikasi.

b. Program Prioritas: Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

- Penanggung Jawab : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.
- 1) Kegiatan Prioritas: Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri
Penanggung Jawab : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.
 - 2) Kegiatan Prioritas: Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional
Penanggung Jawab : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.
 - 3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional
Penanggung Jawab : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.

- 4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global

Penanggung Jawab : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.

c. Program Prioritas: Penegakan Hukum Nasional

Penanggung Jawab : Direktur Hukum dan Regulasi.

- 1) Kegiatan Prioritas: Penataan Regulasi

Penanggung Jawab : Direktur Hukum dan Regulasi.

- 2) Kegiatan Prioritas: Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Penanggung Jawab : Direktur Hukum dan Regulasi.

- 3) Kegiatan Prioritas: Penguatan Sistem Anti Korupsi

Penanggung Jawab : Direktur Hukum dan Regulasi.

- 4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Akses terhadap Keadilan

Penanggung Jawab : Direktur Hukum dan Regulasi.

d. Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Penanggung Jawab : Direktur Aparatur Negara.

- 1) Kegiatan Prioritas: Penguatan Implementasi Manajemen ASN

Penanggung Jawab : Direktur Aparatur Negara.

- 2) Kegiatan Prioritas: Transformasi Pelayanan Publik

Penanggung Jawab : Direktur Aparatur Negara.

- 3) Kegiatan Prioritas: Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

Penanggung Jawab : Direktur Aparatur Negara.

- 4) Kegiatan Prioritas: Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Penanggung Jawab : Direktur Aparatur Negara.

e. Program Prioritas: Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Penanggung Jawab : Direktur Pertahanan dan Keamanan.

- 1) Kegiatan Prioritas: Penguatan Keamanan Dalam Negeri

Penanggung Jawab : Direktur Pertahanan dan Keamanan.

- 2) Kegiatan Prioritas: Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi *Confidence Building Measures* (CBM)

Penanggung Jawab : Direktur Pertahanan dan Keamanan.

- 3) Kegiatan Prioritas: Keamanan Laut
Penanggung Jawab : Direktur Pertahanan dan Keamanan.
- 4) Kegiatan Prioritas: Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Penanggung Jawab : Direktur Pertahanan dan Keamanan.
- 5) Kegiatan Prioritas: Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber
Penanggung Jawab : Direktur Pertahanan dan Keamanan.

4.2. Pendanaan Prioritas Nasional

4.2.1. Alokasi Per PN

- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

4.2.2. Alokasi *Major Project*

- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

BAB 5: KAIDAH PELAKSANAAN

5.1. Kerangka Kelembagaan

- Penanggung Jawab : Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan.
Ketua Pelaksana : Direktur Aparatur Negara.

5.2. Kerangka Regulasi

- Penanggung Jawab : Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan.
Ketua Pelaksana : Direktur Aparatur Negara.

5.3. Kerangka Evaluasi dan Pengendalian

- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
Ketua Pelaksana : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektor.

BAB 6: PENUTUP

- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Evaluasi dan Pengendalian
Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

Lampiran 1: Matriks Pembangunan Prioritas Nasional

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

Lampiran 2: Matriks *Major Project*

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

Lampiran 3: Suplemen BUMN

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Ekonomi.

Ketua Pelaksana : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN.

F. TIM KOORDINASI PROSES PERENCANAAN

Rapat Koordinasi dengan Gubernur

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.

Ketua Pelaksana : Direktur Tata Ruang dan Penanganan
Bencana.

Wakil Ketua Pelaksana I : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

Wakil Ketua Pelaksana II : Direktur Evaluasi Pengendalian Penyusunan
Perencanaan Pembangunan.

Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.

Ketua Pelaksana : Direktur Tata Ruang dan Penanganan
Bencana.

Wakil Ketua Pelaksana I : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif.

Wakil Ketua Pelaksana II : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan Daerah.

Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
Wakil Ketua Pelaksana : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral.

Musrenbang Provinsi

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.
Ketua Pelaksana : Direktur Pembangunan Daerah.
Wakil Ketua Pelaksana I : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
Wakil Ketua Pelaksana II : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

Musrenbang Nasional

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
Ketua Pelaksana : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
Wakil Ketua Pelaksana : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

G. TIM KOORDINASI PENYUSUN SUBSTANSI

Ketua Pelaksana : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
Wakil Ketua Pelaksana I : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral.
Wakil Ketua Pelaksana II : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Wakil Ketua Pelaksana III : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.
Wakil Ketua Pelaksana IV : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
Wakil Ketua Pelaksana V : Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
Wakil Ketua Pelaksana VI : Direktur Transportasi.
Wakil Ketua Pelaksana VII : Direktur Lingkungan Hidup.
Wakil Ketua Pelaksana VIII : Direktur Hukum dan Regulasi.
Wakil Ketua Pelaksana IX : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

Anggota

1. Ir. Bambang Triyono;
2. Afwandi, SE;
3. Chairul Rijal, SE, MAP, MIDS;
4. Meitha Ika Pratiwi, S.P, MBA;
5. Tini Partini Nuryawani, S.Si, MIDEDEC
6. Wahyu Wijayanto, SIP, MA;
7. Yogi Harsudiono, SE, MPA;
8. Mochammad Firman Hidayat, SE, MA;
9. Ibnu Yahya, SE, M.Ec.Pol;
10. Muhammad Abdurrachman, ST;
11. Mohammad Agung Widodo, SP, MIDEDEC;
12. Diah Lenggogeni, ST, Msci;
13. Aswicaksana, ST, MT, MSc;
14. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MIT;
15. Sidayu Ariteja, SE, MPP;
16. Adhi Rachman Prana, SE, M.DevSt;
17. Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, MSc;
18. Vivi Andriani, ST, MSc;
19. Suprpto Budinugroho, ST, M.Eng;
20. Didik Darmanto, S.Sos, MPA;
21. Ahmad Zainudin, S.Sos;
22. Handhi Setiawan Adiputra, ST;
23. Akhmad Fais Fauzi, ST, M.Eng;
24. Erni Nora Siahaan, ST;
25. Erik Armundito, ST, MT, Ph.D;
26. Ersya Herwinda, S.Hut, M.Sc;
27. Anna Amalia, ST, M.Env;
28. Tanti Dian Ruhama, SH, MH;
29. Rezafaraby, SH, LLM;
30. Rina Asriyani, SE, MSc;
31. Agus Riyanto Kurniawan, SE, M.Dev.Econ (Adv.);

32. Mohamad Ridho Hasanudin, S.Pd;

33. Mely Chinthya Devi, S.H;

34. Lydwina Adhistry, S.T.

H. TIM DUKUNGAN ADMINISTRASI

Ketua Pelaksana : Kepala Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan.

Wakil Ketua Pelaksana I : Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan,
Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

Wakil Ketua Pelaksana II : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan
Tata Laksana.

Wakil Ketua Pelaksana III : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata
Usaha Pimpinan.

Wakil Ketua Pelaksana IV : Kepala Biro Hukum.

Wakil Ketua Pelaksana V : Kepala Biro Umum.

Wakil Ketua Pelaksana VI : Kepala Pusat Analisis dan Kebijakan Kinerja.

Anggota : 1. Suhartatik, ST, MM;
2. Mirza, S.Kom, MA, MPA;
3. Indra Wisaksono, SE, MPP;
4. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos;
5. Sigit Santoso, S.Pd, M.Pd;
6. Eri Mulia, SE, ME;
7. Agus Sutarman SE, MAP, MIDS;s
8. AAA Diana Aryani Djlantik, SE, MM;
9. David Tinambunan, S.Sos;
10. Harjono;
11. Diah Triastuti,
12. Dedeh Heni Herlina, S.Sos;
13. Syaiful Afif, SS, MPPM;
14. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM;
15. Naomi Helena Tambunan, SH,
MLaw.Dev;
16. Nia Kurniati, SH;
17. Nurpi, SE;
18. Wawan Setiaawan;

19. Nanang Kurniawan;
20. Slamet;
21. Mat Soleh Siswanto;
22. Yunhri Trima Vibian, SE, MM;
23. Desika Kuswarini, SE, M.Ak, CRMP;
24. Ghifari Aulia, ST.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

